



Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2023



SAMBUTAN **SOSIALISASI PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

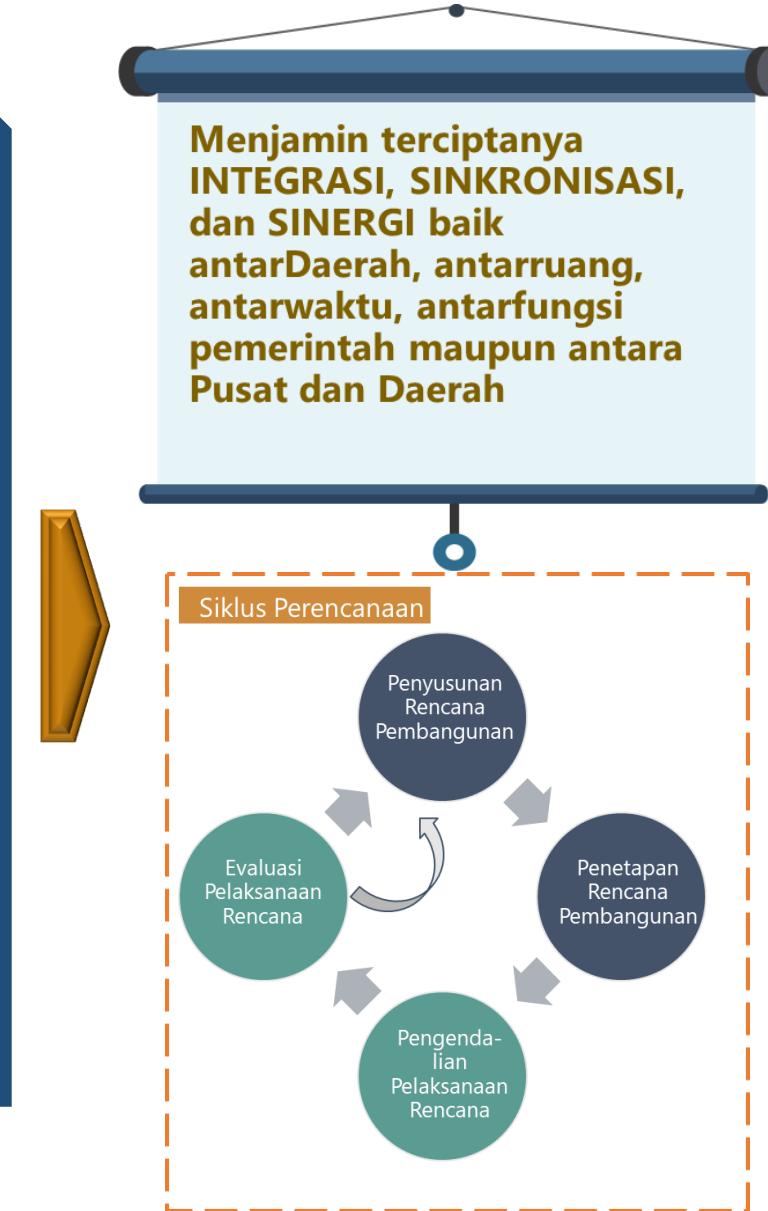
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas

12-13 Januari 2023

Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN)



Kementerian PPN/Bappenas adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Nasional (**dengan tahapan: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana**) melalui sistem perencanaan, yang bertujuan →



-  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
-  Koordinasi antarpelaku pembangunan
-  Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
-  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)



Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap provinsi, kabupaten, dan kota melalui Penghargaan Pembangunan Daerah.

PPD diselenggarakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

TUJUAN

1. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan
2. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan
4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Proses penyusunan dokumen RKPD
2. Kualitas dokumen RKPD
3. Pencapaian pembangunan
4. Inovasi Pembangunan

PERKEMBANGAN PPD (2011-2022)



Peningkatan kualitas PPD

Evaluasi dan motivasi Daerah

Perubahan nama dari Anugerah Pangripta Nusantara (APN) menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sejak 2018

Prestige

Diserahkan oleh Presiden RI pada tahun 2018 dan 2019, disaksikan secara virtual oleh Presiden pada 2020, 2021, dan 2022

Fairness dan Equal treatment

Sosialisasi dengan mengundang 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota sejak tahun 2019

Apresiasi

Capacity building kepada daerah terbaik. Dana Insentif Daerah (DID) diberikan untuk Daerah Terbaik alokasi mulai tahun anggaran 2018

Knowledge Sharing

Sharing praktik-praktik cerdas pembangunan daerah untuk alternatif solusi

Digital Evaluation System

Penguatan sistem penilaian berbasis *web-based* untuk user pusat dan user daerah

MANFAAT PPD

Pemerintah Pusat

- Mendapatkan data dan informasi detail mengenai kualitas perencanaan pembangunan Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Memahami kapasitas daerah dan SDM dalam perencanaan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan, serta keunggulan program dan kegiatan dalam pembangunan daerah.
- Memperkuat koordinasi untuk pembangunan daerah

Pemerintah Daerah

- Penyampaian Rekomendasi terhadap Perbaikan Dokumen Perencanaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui *Web Diagram*
- Mendorong Kepala Daerah dan Perangkatnya lebih memahami perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian, serta inovasi untuk penyelesaian masalah
- Mendorong pembangunan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan inovatif serta berkelanjutan.
- Berpotensi mendapatkan DID

Non Pemerintah

- Memahami bahwa dokumen perencanaan yang baik sangat penting dalam pembangunan daerah
- Terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
- Mendorong non-government untuk peduli dengan pembangunan daerah, membantu pemerintah daerah, dan mementingkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah
- Membantu menciptakan *awareness* bahwa peran masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah

Knowledge Sharing Framework



<https://peppd.bappenas.go.id/>

Penghargaan Pembangunan
Daerah Tahun 2023

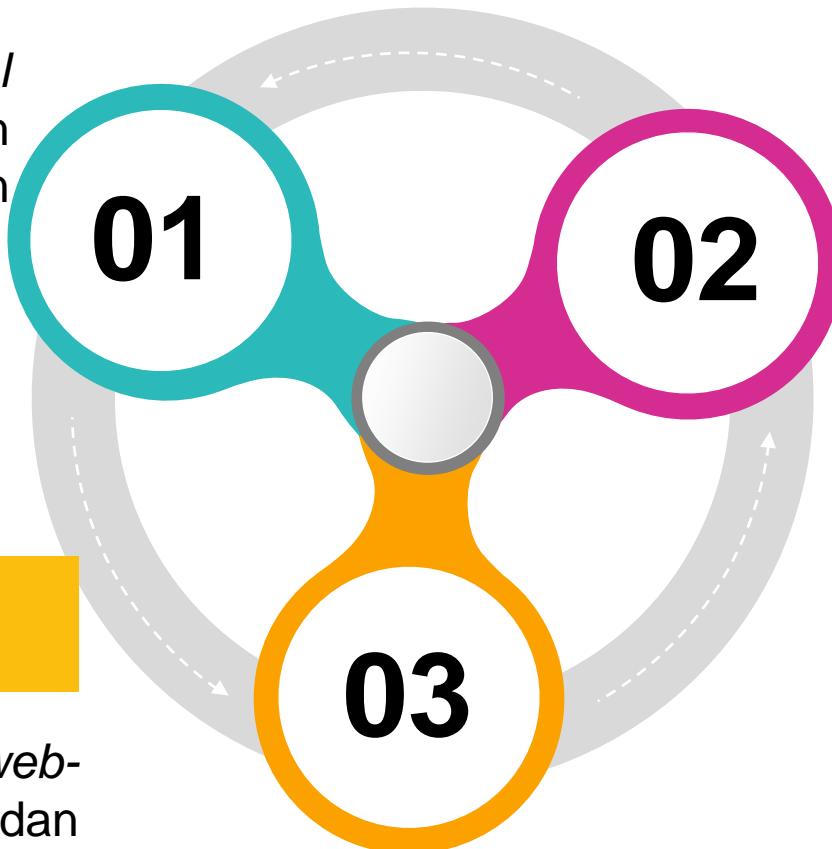
NEW FEATURES PPD 2023

ADDITIONAL INDICATOR FOR LOCAL CONTENT

Penambahan *item* penilaian *local content*, terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

USER FRIENDLY DIGITAL EVALUATION SYSTEM

Penguatan sistem penilaian *web-based* untuk *user* pusat (TPI, TPU, dan TPT) dan *user* daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) lebih *user friendly*.



SUPPORTING REFERENCE DOCUMENT FOR PROVINCIAL EVALUATION

Penguatan informasi daerah melalui dokumen suplemen untuk proses penilaian pada level provinsi





Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2023



TERIMA KASIH

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah

Gedung Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07
Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan